

71
388.31
NAN.
4
1994



LAPORAN HASIL PENELITIAN

Judul :
**KOORDINASI PERENCANAAN
TRANSPORTASI KOTA SEMARANG**

Disusun oleh :
TIM PENELITIAN

FAKULTAS TEKNIK
JURUSAN TEKNIK SIPIL
UNIVERSITAS DIPONEGORO
1994

**Dibiayai oleh DIP Proyek Operasi dan Perawatan Fasilitas
Universitas Diponegoro Nomor : 172 A / PT09 . OP / A / 1993
2 Agustus 1993**

LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN

1. a. Judul Penelitian : Koordinasi Perencanaan Transportasi kota Semarang
- b. Macama Penelitian : Pengembangan
- c. Kategori Penelitian : Penelitian untuk menunjang Pembangunan
2. Kepala Proyek Peneletian :
 - a. Nama Lengkap dan gelar : Ir. Moga Narayudha, Sp1
 - b. Jenis Kelamin : Laki-laki
 - c. Golongan pangkat dan NIP : III C / 130 810 731
 - d. Jabatan Fungsional : Lektor Muda
 - e. Fakultas / Jurusan : Teknik / Teknik Sipil
 - f. Bidang Ilmu : Teknik
3. Susunan Tim Peneliti : Ir. Moga Narayudha, Sp1
Ir. Purwanto
Ir. Muhrozi, MS
Ir. Eko Mujihartono, MSP
Ir. Parang Sabdono
4. Lokasi Penelitian : Kotamadia Semarang
5. Lama Penelitian : 6 (enam) bulan.
6. Biaya Penelitian : Rp. 1.500.000,-
(Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
7. Dibiayai melalui Proyek : Operasi dan Perawatan Fasilitas Universitas Diponegoro Anggaran Tahun 1993 / 1994

Semarang, Maret 1994

Kepala Proyek Penelitian,

(Ir. Moga Narayudha, SP1)

NIP. 130 810 731



Budihardjo, MSc)

NIP. 130 354 860



(r. Budhi Darmojo)

NIP. 130 431 357.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penelitian ini. Penelitian ini terlaksana atas adanya bantuan Dana DIP Proyek Operasi dan Perawatan Fasilitas Universitas Diponegoro Nomor : 172 A/ P109.OP/ A / 1993, tertanggal 2 Agustus 1993.

Adapun masalah yang dicoba untuk ditelaah adalah di bidang transportasi perkotaan dengan judul *Koordinasi Perencanaan Transportasi Kota Semarang*.

Masalah Koordinasi merupakan masalah krusial/ klasik yang dapat dijumpai pada setiap kegiatan. Hal ini berlaku pula pada kegiatan perencanaan transportasi di kota Semarang. Adapun Koordinasi ini akan ditelaah berdasarkan peran, fungsi dan wewenang instansi yang terlibat di dalam perencanaan transportasi di kota Semarang. Untuk keperluan tersebut, maka perlu ditemukeni faktor-faktor yang menunjang adanya koordinasi tersebut, seperti tata guna lahan, sarana dan prasarana transportasi, serta masyarakat sendiri sebagai pengguna jalan.

Kami sadar bahwa apa yang tertulis dalam penelitian ini masih jauh dari sempurna, baik dalam sistematika maupun isinya. Untuk itu kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan demi sempurnanya tulisan ini.

Akhirnya semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amien.

Semarang, Maret 1994

Penulis

RINGKASAN PENELITIAN

Transportasi perkotaan selain sebagai dasar pemenuhan kebutuhan perjalanan bagi tujuan-tujuan masyarakat kota, juga mempunyai tujuan yang lebih luas lagi yaitu sebagai tujuan kota. Tujuan masyarakat dimasukkan untuk memenuhi keperluan kehidupan dan penghidupan sehari-hari, dan sebagai tujuan kota dimasukkan untuk menyebar-luaskan dan meningkatkan kemudahan pelayanan, memperluas kesempatan perkembangan kota, serta meningkatkan daya guna penggunaan sumber-sumber yang ada.

Suatu kenyataan bahwa permintaan pelayanan yang disediakan untuk menunjang sistem transportasi kota selalu tidak diimbangi dengan kebutuhan yang diperlukan. Hal ini tercermin dengan adanya sistem peraturan dan pengaturan yang belum mantap, dan belum sinkronnya kerja-sama antar instansi yang terkait dalam kegiatan transportasi. Untuk mengatasi hal tersebut, maka diperlukan adanya koordinasi antar instansi yang terlibat.

Dari kajian terhadap koordinasi perencanaan transportasi kota Semarang ini, diharapkan akan ditemu kenali pengaruh dari masing-masing instansi yang terlibat di dalam menanggulangi transportasi di Kotamadya Dati II Semarang.

Adapun instansi-instansi yang terlibat di dalam kegiatan transportasi di Kotamadya Dati II Semarang yang akan dikaji, di antaranya : Bappeda, Dinas Tata Kota, DPU, Dipenda, DLLAJR, Perum DAMRI, Dirjen Bina Marga, Satpolantas Kotabes Semarang, Bagian Hukum Kotamadya Dati II Semarang dan Perum Kereta Api Daop IV Wilayah Jawa.

Usaha-usaha yang dilakukan guna terciptanya suatu koordinasi di dalam sistem transportasi perkotaan itu bertujuan untuk memastikan hubungan yang baik dan teratur secara menyeluruh, antar instansi yang terlibat di dalamnya sesuai dengan fungsi, peran dan wewenangnya.

SUMMARY

Urban Transportation is not only as basic fulfilment of urban trip requirement for urban society objective, but also has broader as urban objective.

The society objective is concerned to fulfil required urban activity, and as urban objective is concerned to spread out and improvement urban services, urban growth, and also improvement efficiency of existing resources.

In fact, it's difficult get balance between transportation demands and transportation supply. That's shown as in unsteady regulation system, and unsynchronized coordination among inter departements in transportation activity. So that, to get solving this problem requires coordination of involved departements.

The analysis of transportation planning coordination in Semarang can be identified by influence of each departements on the solved transportation problem.

The departements involve in the coordination transportation system in Semarang, such as; Bappeda, Dinas Tata Kota, DPU, Dipenda, DLLAJR, Perum Damri, Dirjen Bina Marga, Satpolantas Kotabes Semarang and Perum Kereta Api Daop IV Java.

Effort to coordinate urban transportation system is to ensure integrated coordination and comprehensive approach planning on inter departements involving in the transportation system in their functions, job description, their authotiry.

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Halaman Judul.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Ringkasan Penelitian.....	iv
Summary.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR DIAGRAM/ SKEMA.....	ix
DAFTAR PETA/ GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tinjauan Pustaka.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Metode Pendekatan.....	5
1.5 Sistematika Pelaporan.....	6
BAB II KETERLIBATAN INSTANSI DALAM PERENCANAAN TRANSPORTASI	
2.1 Peran dan wewenang instansi yang terlibat.....	8
2.2 Keterlibatan masing-masing instansi.....	8
2.3 Hubungan antar instansi yang terlibat.....	13
2.4 Koordinasi perencanaan transportasi.....	14

BAB III	KOOORDINASI SISTEM TRANSPORTASI KOTA SEMARANG	
3.1	Penelitian dan Perencanaan Tata guna lahan dan Prasarana.....	19
3.2	Pelaksanaan dan Pengawasan Tata guna lahan dan Prasarana.....	22
3.3	Penelitian dan Perencanaan Sarana Transportasi.....	34
3.4	Pelaksanaan dan Pengawasan Sarana Transportasi.....	37
3.5	Penelitian Operasi Transportasi dan Pembinaan Masyarakat.....	40
3.6	Perencanaan Operasi Transportasi dan Pembinaan Masyarakat.....	42
3.7	Pelaksanaan Operasi Transportasi dan Pembinaan Masyarakat.....	45
3.8	Pengawasan Operasi Transportasi dan Pembinaan Masyarakat.....	48
BAB IV	KESIMPULAN DAN SARAN	
4.1	Tata guna lahan dan Prasarana.....	53
4.2	Sarana Transportasi.....	55
4.3	Operasi Transportasi dan Pembinaan Masyarakat.	57
4.4	Koordinasi Perencanaan Transportasi.....	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

<i>No Tabel</i>	<i>J u d u l</i>	<i>Halaman</i>
2.1	Fungsi dan Peran Instansi Yang Terlibat Dalam Perencanaan Transportasi.....	9
2.2	Keterlibatan Instansi Menurut Tahapan Dan Materi.....	11
2.3	Matriks Arus Instansi Antar Instansi.....	12
3.1	Panjang Jalan Berdasarkan Kelasa Jalan di Kotamadia Dati II Semarang Tahun 1992	31

DAFTAR DIAGRAM / SKEMA

<i>No Diagram/ Skema</i>	<i>J u d u l</i>	<i>Halaman</i>
1.1	Diagram Hubungan Antara Sistem Aktivitas, Sistem Transportasi dan Sistem Kelembagaan....	3
2.1	Diagram Hubungan Antar Instansi Dalam Kegiatan Perencanaan dan Pelaksanaan Pelayanan Prasarana Jalan.....	16
2.2	Diagram Hubungan Antar Instansi Dalam Kegiatan Perencanaan dan Pelaksanaan Sistem Rambu-rambu Lalu-lintas.....	18

DAFTAR PETA/ GAMBAR

<i>No Peta/ Gambar</i>	<i>J u d u l</i>	<i>Halaman</i>
3.1	Rencana Tata Guna Tanah Kotamadia Dati II Semarang Tahun 2000.....	23
3.2	Arah Kecenderungan Perkembangan Penduduk.....	25
3.3	Pola Jaringan Jalan.....	29
3.4	Fungsi Jalan.....	30
3.5	Lebar Jalan.....	33

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kota Semarang yang mempunyai luas 37.370 Ha dengan peningkatan penduduk rata-rata 2,33 % pertahun dari tahun 1980 - 1993, sampai akhir tahun 1993 penduduknya berjumlah 1.227.032 jiwa. Peningkatan penduduk tersebut menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk di segala bidang (Sosial, Ekonomi dan Politik), yang berakibat pula pada peningkatan intensitas pergerakan penduduk yang terjadi di kota Semarang.

Berdasarkan Revisi RIK 1975-2000, peningkatan kendaraan bermotor di kota Semarang rata-rata sekitar 4,29 % pertahun. Di sisi lain, peningkatan panjang jaringan jalan hanya sekitar 3,40 % pertahun. Hal ini mengakibatkan kapasitas jaringan jalan di kota Semarang sebagian besar kurang memadai. Keadaan tersebut menjadi lebih parah dengan adanya jaringan jalan yang digunakan untuk lalu-lintas campuran, parkir pada badan jalan, dan kurang tersedia jalur pemisah antara lalu-lintas lambat dengan lambat cepat.

Disamping itu, konstruksi jaringan jalan yang ada di kota Semarang kurang mampu menahan beban berat, sehingga banyak jaringan jalan yang tidak sesuai dengan fungsi yang diembannya.

Di sisi lain dengan munculnya penggunaan lahan pada beberapa sektor kegiatan seperti kegiatan perdagangan, perkantoran dan perumahan di beberapa tempat di wilayah kotamadia Dati II Semarang, sering menimbulkan permasalahan pada kegiatan transportasi, seperti kemacetan dan kesemrawutan lalu-lintas. Kesemuanya ini membuat tingkat pelayanan jaringan di kota Semarang menjadi semakin rendah.

Adapun usaha-usaha yang telah dilakukan oleh penda tingkat II kotamadia Semarang dalam menanggulangi masalah transportasi ini, di antaranya dengan memperlebar dan memepertinggi mutu konstruksi jalan. Akan tetapi dengan usaha pelebaran jalan ini tidak mungkin dilakukan terus menerus. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan lahan, dana serta kurang adanya koordinasi antar instansi yang terlibat dalam kegiatan transportasi. Sehingga tidak jarang terjadi pada jaringan jalan yang sudah dilebarkan masih mengalami kemacetan lalu-lintas.

1.2 TINJAUAN PUSTAKA

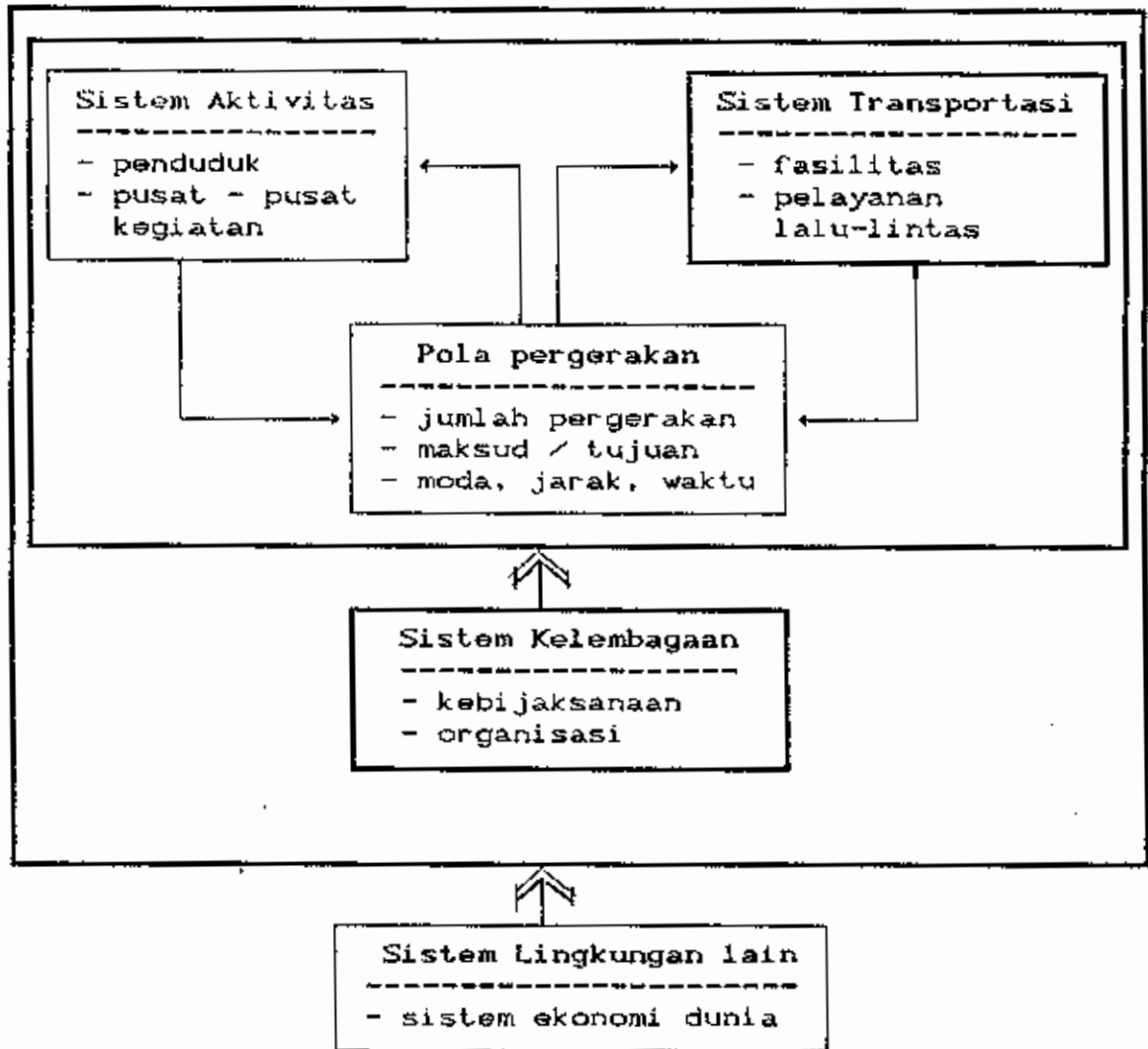
1.2.1 Sistem Transportasi Perkotaan

Menurut Black (1977 : 4) dijelaskan bahwa, lokasi aktivitas di kota atau fungsi-fungsi kota merupakan akibat kumulatif dari adanya keputusan-keputusan perorangan yang mewakili dari instansi-instansi yang terkait di dalamnya. Keputusan-keputusan tersebut ditetapkan untuk dapat memenuhi tujuan-tujuan tertentu dalam suatu kendala yang tertentu pula. Hal ini terjadi pula pada proses terwujudnya arus lalu-lintas pada sistem transportasi perkotaan. Oleh karena itu, keputusan-keputusan tersebut saling mempengaruhi satu sama lainnya, dan secara evolusi dalam prosesnya dapat mewujudkan suatu sistem transportasi seperti yang ada saat ini.

Selain itu, oleh Manheim (1979 : 11 - 14), digambarkan secara jelas keterkaitan antara sistem transportasi dan sistem aktivitas serta pengaruhnya terhadap pola pergerakan lalu-lintas. Di lain pihak pola pergerakan ini juga dipengaruhi oleh sistem kelembagaan kota, misalnya pengaturan pergerakan lalu-lintas regional, dan pengaturan pemanfaatan tata guna lahan perkotaan. Pengaturan ini akan mempengaruhi pola pergerakan penduduk dan pola pergerakan lalu-lintas. Hubungan antara sistem aktivitas, sistem transportasi dan pola pergerakan serta sistem kelembagaan dapat dilihat pada skema diagram 1.1 pada halaman berikut ini.

Diagram 1.1

DIAGRAM HUBUNGAN ANTARA SISTEM AKTIVITAS,
SISTEM TRANSPORTASI DAN SISTEM KELEMBAGAAN



Sumber : Kusbiantoro, *Sistem Transportasi Perkotaan*, 1987

Adapun usaha yang dilakukan guna terciptanya suatu koordinasi di dalam sistem transportasi perkotaan itu bertujuan untuk memastikan hubungan yang kompak dan teratur secara menyeluruh baik antara instansi-instansi yang terlibat di dalamnya sesuai dengan fungsi, peran dan wewenangnya masing-masing maupun di dalam instansi itu sendiri. Di sisi lain timbul permasalahan sampingan akibat kurang mengertinya manfaat koordinasi baik dalam arti secara ekonomis maupun teknis, serta adanya perbedaan sumber pembiayaan yang mengatur sistem transportasi tersebut (Morlok, 1978 : 378).

1.2.2 Keterlibatan masing-masing Instansi

Peninjauan terhadap keterlibatan masing-masing instansi di dalam menangani masalah transportasi kota Semarang ini akan diuraikan menurut tahapan-tahapan seperti penelitian, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan (Soemardi, 1992 : 84). Dan mengingat subyek yang dicakup oleh masing-masing tahapan sifatnya sangat luas, maka untuk mempermudah bahasan subyek-subyek tersebut dikelompokkan yang masing-masing mencakup aspek tata guna tanah, prasarana, sarana, operasi, dan pembinaan masyarakat.

Adapun instansi-instansi yang berperan di dalam pemecahan masalah transportasi kota Semarang di antaranya :

- (1). BAPPEDA Tk. II Kotamadia Semarang
- (2). Dinas Tata Kota Kotamadia Semarang
- (3). Dinas Pekerjaan Umum Kotamadia Semarang
- (4). Dinas Pendapatan Daerah Kotamadia Semarang
- (5). Bagian Hukum Kotamadia Semarang
- (6). DLLAJR Tingkat II Kotamadia Semarang
- (7). Perum DAMRI
- (8). Satpolantas Kotabes Semarang
- (9). PERUMKA
- (10). Direktorat Jendral BINA MARGA

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Berdasarkan latar belakang di atas, maka maksud penelitian ini adalah untuk melakukan identifikasi/ peninjauan terhadap instansi-instansi yang terlibat dalam kegiatan transportasi sesuai dengan fungsi, peran serta wewenang yang dipunyai. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menemukenali pengaruh dari masing-masing yang terlibat di dalam menanggulangi masalah transportasi di kota Semarang.

Dari hasil penelitian ini akan diketahui bagaimana mekanisme yang terjadi dari masing-masing instansi tersebut sesuai peranannya dalam menanggulangi masalah transportasi. Jika dari hasil penelitian ini terlihat adanya instansi yang terlibat sesuai dengan peranannya, namun tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka penanggulangan masalah transportasi di kota Semarang belum dapat tercapai seperti yang diharapkan. Untuk itu diperlukan adanya dukungan dari masing-masing instansi sesuai dengan fungsi, peran dan wewenangnya.

Dengan demikian hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran untuk membantu penanggulangan masalah transportasi di kota Semarang dilihat dari fungsi dan peranan masing-masing instansi yang terlibat dalam kegiatan transportasi di kota Semarang.

1.4 METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu dengan menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Tahap Pertama, menginventarisasi dan mengkaji instansi-instansi yang terlibat di dalam kegiatan transportasi di kota Semarang, yaitu di antaranya seperti BAPPEDA Tingkat II Kotamadia Semarang, Dinas Tata Kota Kotamadia Semarang, Dinas Pekerjaan Umum Kotamadia Semarang, Dinas Pendapatan Daerah Kotamadia Semarang, DLLAJR tingkat II Kotamadia Semarang, Perum DAMRI, Direktorat

Jendral BINA MARGA, Satpolantas Kotabes Semarang, Bagian Hukum Kotamadia Semarang dan PERUMKA.

2. Tahap Kedua, melaksanakan survai di lapangan terhadap instansi - instansi yang terlibat di dalam kegiatan transportasi kota Semarang. Dalam tahap ini akan dicoba untuk menemuknenali pengaruh dari masing-masing instansi yang terlibat dalam kegiatan transportasi di kota Semarang, sesuai dengan fungsi, peran dan wewenangnya.
3. Tahap Ketiga, melakukan analisis terhadap keterlibatan masing-masing instansi di dalam kegiatan transportasi kota Semarang, sehingga akan dicapai suatu koordinasi dalam perencanaan transportasi kota Semarang.

Adapun cara memperoleh data di atas, adalah sebagai berikut :

1. Data primer, yaitu data yang berasal dari hasil survai lapangan. Survai ini bisa berupa hasil wawancara dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada masing-masing instansi yang terlibat di dalam kegiatan transportasi kota Semarang maupun informasi lainnya yang diberikan oleh masing-masing instansi yang bersangkutan sesuai dengan fungsi, peran dan wewenangnya.
2. Data sekunder , yaitu dengan melakukan penelahaan terhadap data sekunder yang dihimpun dari buku-buku literatur, surat kabar, informasi dari laporan ristek, dan sumber bacaan lain yang dapat dimanfaatkan dalam penelitian ini.

1.5 SISTEMATIKA PELAPORAN

Adapun sistematika pelaporan yang digunakan dalam laporan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab I **Pendahuluan**, yang berisikan tentang latar belakang dan perumusan permasalahan penelitian, tinjauan pustaka yang digunakan, maksud dan tujuan penelitian yang hendak dicapai, metode pendekatan dan sistematika pelaporan.

Bab II **Keterlibatan Instansi dalam perencanaan transportasi**
Dalam pembahasan bab ini akan diuraikan tentang peran dan wewenang instansi yang terlibat, keterlibatan masing-masing instansi, hubungan antar instansi dan koordinasi perencanaan transportasi.

Bab III **Koordinasi Sistem Transportasi kota Semarang**
Dalam bab ini akan dibahas mengenai koordinasi perencanaan transportasi kota Semarang dibedakan menjadi dua yaitu kegiatan yang dilakukan dan materi yang digunakan sebagai indikasi perencanaan transportasi. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan penelitian, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Dan materi yang digunakan di antaranya tata guna lahan, prasarana dan sarana transportasi, operasionalisasi dan pembinaan masyarakat.

Bab IV **Kesimpulan dan Saran**
Dalam bab ini akan dicoba memberikan kesimpulan dan saran pada perencanaan transportasi kota Semarang baik pada kegiatan yang dilakukan maupun materi yang digunakan sebagai indikasi perencanaan transportasi.